

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengangguran merupakan suatu fenomena yang terjadi di semua negara berkembang termasuk Indonesia. Pengangguran menjadi suatu permasalahan yang sangat serius di Indonesia, karena dapat berdampak pada masalah sosial. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih melakukan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dimana tujuan dari pembangunan tersebut yaitu untuk mengurangi pengangguran. Menurut Suyuthi (1989) dalam (Hadi Prasaja et al., 2013) dilihat dari segi ekonomi, adanya pengangguran menyebabkan kemakmuran masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berpengaruh pada stabilitas dan pembangunan ekonomi akan terhambat serta kesejahteraan menjadi berkurang. Dalam mencapai kemakmuran masyarakat, salah satunya dibutuhkan kesempatan kerja yang mendukung dan adanya pemerataan pendapatan pada masyarakat, di Indonesia pengangguran disebabkan oleh peningkatan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang telah disediakan pemerintah tingkat pengangguran mengukur sejauh mana angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang telah disediakan.

Dalam teori Keynesian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi meningkatkan permintaan agregat, memperluas investasi dan konsumsi, serta mendorong dunia usaha untuk meningkatkan produksi. Proses ini akan menciptakan lapangan kerja

baru dan mengurangi pengangguran (Mankiw, 2003). Sukirno (2006) juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menandakan peningkatan aktivitas ekonomi, yang secara langsung meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja di berbagai sektor produksi.

Upah Minimum merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap pengangguran terbuka. Dimana Kenaikan upah minimum memiliki dua dampak yang berlawanan terhadap pengangguran. Di satu sisi, peningkatan upah minimum dapat menurunkan pengangguran dengan mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi agregat yang berujung pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Di sisi lain, jika kenaikan upah tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, maka perusahaan cenderung mengurangi jumlah pekerja karena biaya produksi meningkat, sehingga dapat menyebabkan pengangguran meningkat (Mankiw, 2003; Sukirno, 2006).

Dalam teori pasar tenaga kerja klasik, keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan tingkat pengangguran. Ketika TPAK meningkat tanpa diikuti dengan peningkatan lapangan kerja, maka terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja (*labor surplus*) yang menyebabkan meningkatnya pengangguran (Mankiw, 2003). Sebaliknya, apabila peningkatan TPAK diiringi dengan ekspansi ekonomi dan peningkatan investasi, maka tenaga kerja tambahan dapat terserap, sehingga pengangguran menurun (Putong, 2003).

Dalam perkembangan teknologi informasi, internet memiliki peran penting sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara laju pertumbuhan

ekonomi, upah minimum, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap pengangguran. Internet memperkuat efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja. Digitalisasi mendorong transformasi struktur kerja, efisiensi produksi, serta membuka peluang bagi platform pekerjaan berbasis teknologi seperti ekonomi kreatif dan gig economy. Dalam penelitian Monge-González et al. (2012) yang menemukan bahwa adopsi internet mempercepat efek pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja melalui inovasi teknologi dan difusi industri digital. Dengan hadirnya internet, dampak kenaikan upah minimum terhadap pengangguran dapat diperlemah. Internet meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan produktivitas, sehingga perusahaan dapat menekan biaya operasional walaupun upah meningkat. Menurut Stockinger dan Bastian (2021), internet memungkinkan adaptasi teknologi seperti otomasi sederhana, pemasaran digital, dan sistem manajemen online yang dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga kenaikan upah minimum tidak serta-merta meningkatkan pengangguran. Hal ini relevan dengan Solow's Technology Productivity Theory, yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kemudian, internet meningkatkan efisiensi pencocokan antara pencari kerja dan informasi lowongan (*job matching efficiency*). Internet membuka akses ke pekerjaan *remote*, *freelance*, *digital-based services*, dan *marketplace* pekerjaan berbasis *platform*. Fenomena ini sejalan dengan Human Capital Theory (Becker, 1964) di mana *digital skills* meningkatkan *employability*. Dengan demikian, peran

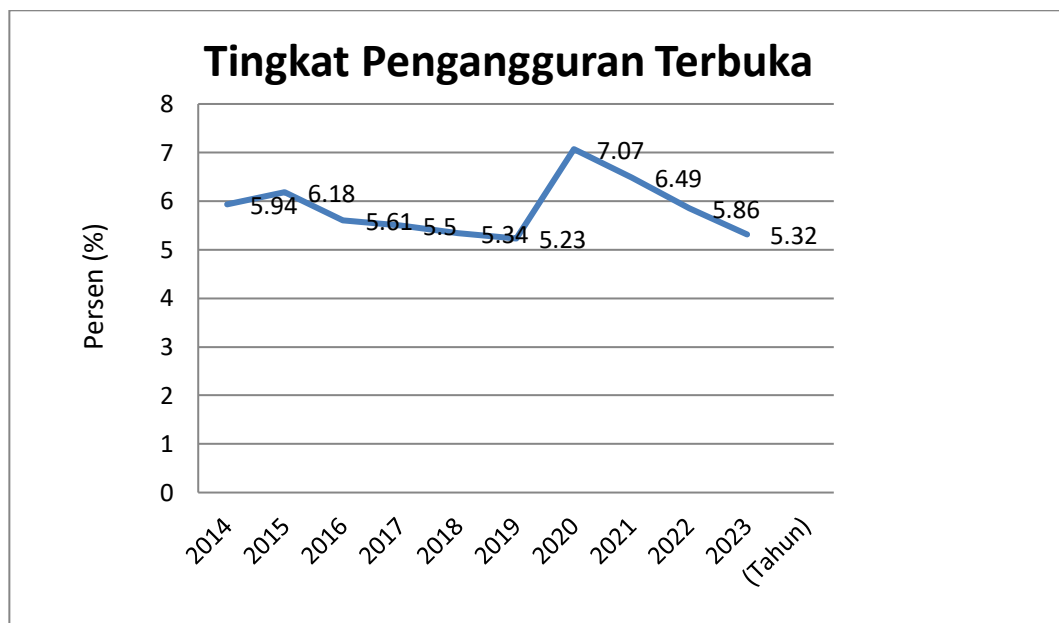
internet mempercepat penyerapan tenaga kerja dan membuat kebijakan ekonomi lebih efektif dalam mengurangi pengangguran.

Penanaman Modal Asing berperan sebagai variabel intervening yang memudahkan akses pada pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap pengangguran. Secara teori, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar potensi masuknya investasi asing karena negara dianggap memiliki stabilitas ekonomi dan pasar yang potensial. Hal ini sesuai dengan Teori Pertumbuhan Neoklasik Solow (1956) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkatkan akumulasi modal, termasuk arus modal asing yang dapat memperluas kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja. Dalam penelitian Pandiangan et al. (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap PMA, dan PMA kemudian menurunkan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru. Upah minimum dapat memengaruhi keputusan investor asing. Berdasarkan Teori Biaya Produksi dari Mankiw (2003) dan Sukirno (2006), upah minimum yang terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya tenaga kerja dan menurunkan minat investasi, namun upah yang kompetitif justru menjadi daya tarik investor untuk membuka usaha padat karya. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia produktif siap bekerja. Namun, tanpa investasi yang memadai, peningkatan TPAK justru dapat meningkatkan pengangguran karena keterbatasan kesempatan kerja. Hal ini dijelaskan dalam Teori Human Capital (Becker, 1964) dan Teori Pertumbuhan Endogen (Romer, 1986) yang menekankan bahwa tenaga kerja terampil akan

menarik investasi dan meningkatkan produksi. Dengan begitu PMA berperan sebagai faktor penghubung yang memperkuat pengaruh LPE, upah minimum, dan TPAK terhadap penurunan pengangguran melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan pekerjaan baru, dan peningkatan daya serap pasar tenaga kerja.

Menurut Putong (2013) dalam (Rochim Mohamad, n.d.) pengangguran bisa disebabkan oleh terbatasnya informasi lapangan kerja yang hanya bisa diakses oleh pencari kerja serta lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh para pencari kerja. Dalam perkembangan modern, penggunaan internet (PI) memiliki peran yang semakin penting dalam mengubah dinamika pasar tenaga kerja. Internet tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga alat strategis yang mempengaruhi efisiensi ekonomi dan mobilitas tenaga kerja. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan sistem ekonomi yang lebih terbuka dan terkoneksi, di mana proses rekrutmen, pelatihan, hingga aktivitas usaha kini banyak bergantung pada jaringan internet. Oleh karena itu, dalam hubungan antara faktor-faktor ekonomi makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pengangguran terbuka, penggunaan internet dipandang sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut. Kemudian penanaman modal asing sebagai variabel intervening juga dapat memudahkan akses pada hubungan faktor ekonomi seperti pada laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap penurunan pengangguran.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika pengangguran di Indonesia, penting untuk menganalisis grafik yang menunjukkan tren tingkat pengangguran selama sepuluh tahun terakhir. Grafik ini mencerminkan penurunan angka pengangguran, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial. Dengan memahami tren ini, kita dapat mengidentifikasi periode-periode di mana pengangguran mengalami penurunan, serta mengevaluasi efektivitas program-program yang telah diterapkan dalam upaya pengentasan pengangguran.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional Tahun 2014-2023

Gambar 1.1

Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Tahun 2014-2023 (%)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional dilihat pada Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada tahun 2014 sebesar 5.94%. Dimana, awal periode pemerintahan baru kondisi ekonomi mulai stabil setelah perlambatan global. Lapangan kerja mulai bertambah meskipun

belum signifikan. Pada tahun 2015 mencapai 6.18%, terjadi kenaikan pengangguran akibat perlambatan ekonomi nasional, harga komoditas dunia menurun, dan melemahnya ekspor. Tahun 2016 tingkat pengangguran mencapai 5.61%, dimana angka pengangguran menurun seiring perbaikan ekonomi dan meningkatnya investasi infrastruktur pemerintah. Pada tahun 2017 pengangguran mencapai 5.50%, kondisi pasar tenaga kerja relatif stabil, didorong peningkatan proyek infrastruktur dan sektor jasa. Tahun 2018 pengangguran mencapai 5.34%, pengangguran kembali turun akibat peningkatan sektor industri pengolahan dan UMKM. Digitalisasi ekonomi mulai meningkat. Kemudian tahun 2019 pengangguran sebesar 5.23%, menjadi tingkat pengangguran terendah selama satu dekade. Pertumbuhan ekonomi stabil sekitar 5%. Pengangguran mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,07%, angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. Peningkatan tajam ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melumpuhkan berbagai sektor ekonomi seperti industri manufaktur, pariwisata, dan jasa. Banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat menurunnya permintaan dan terganggunya rantai pasok global. Kondisi ini mencerminkan guncangan besar pada pasar tenaga kerja nasional, di mana banyak penduduk usia kerja kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari pekerjaan baru karena pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi. Memasuki tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 6,49%. Penurunan ini sejalan dengan mulainya pemulihan ekonomi nasional setelah pemerintah melonggarkan pembatasan aktivitas masyarakat dan meluncurkan berbagai program pemulihan

ekonomi, seperti bantuan sosial dan insentif bagi pelaku usaha. Aktivitas produksi dan distribusi mulai kembali berjalan, meskipun belum sepenuhnya normal. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran kembali turun menjadi 5,86%, menunjukkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih dari 5% turut mendorong terciptanya lapangan kerja baru di berbagai sektor, terutama industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Aktivitas investasi dan konsumsi masyarakat meningkat, sejalan dengan keberhasilan pemerintah dalam memperluas vaksinasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka turun kembali menjadi 5,32%, yang menunjukkan tren positif dalam penyerapan tenaga kerja nasional. Kondisi ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5%, peningkatan investasi asing, serta perluasan sektor-sektor berbasis teknologi dan digital. Perkembangan ekonomi digital juga membuka peluang kerja baru, terutama di sektor jasa online, logistik, dan industri kreatif.

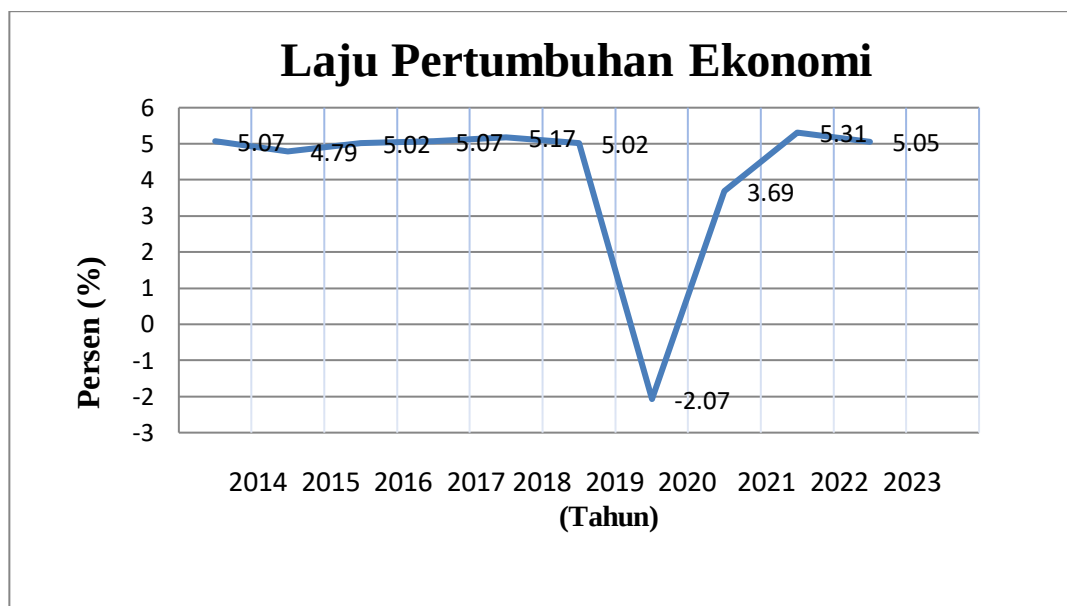
Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, dalam pasal 27 ayat 2 dapat dijelaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia ketika hidup, jika ditinjau dari sudut pandang kemanusiaan, berhak memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang penuh atau layak. Hal ini menunjukkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai dan produktif sesuai dengan konstitusi. Dalam perencanaan pembangunan pemerintah, masalah pengangguran merupakan bagian penting dari tujuan yang harus diatasi, karena tinggi rendahnya permasalahan ini akan mempengaruhi keadaan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan

pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya.

Penurunan angka pengangguran ini menunjukkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya pengentasan pengangguran, serta perlunya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor struktural masih menjadi penghalang dalam menekan angka pengangguran, termasuk ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya pengentasan pengangguran, serta perlunya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa pada masyarakat meningkat serta terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kuznet Jingham (2012:57) dalam (Febriani et al., n.d.) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan pada suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada masyarakat, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan yang diperlukan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi ini dalam menganalisis grafik tingkat

laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk tren yang terjadi, faktor-faktor penyebabnya, serta implikasinya. Berikut grafik tingkat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional

Gambar 1. 2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2023 (%)

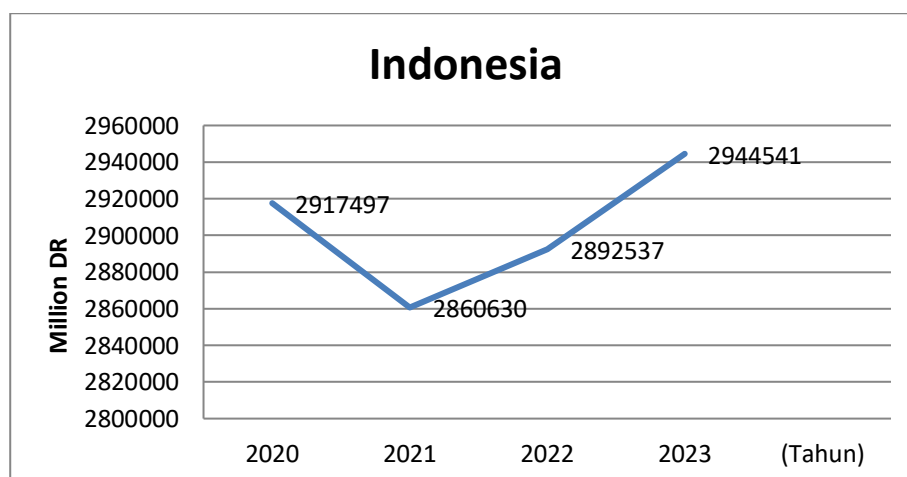
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5,01%, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang stabil serta aktivitas ekspor yang cukup baik. Pada tahun 2015, ekonomi mengalami perlambatan menjadi 4,88%, dipengaruhi oleh melemahnya harga komoditas internasional dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Tahun 2016 menunjukkan pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan 5,03%. Pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur dan investasi mulai meningkat kembali. Stabilitas makro seperti inflasi rendah dan nilai tukar yang relatif terkendali turut

memperbaiki kinerja ekonomi nasional. Pada tahun 2017 Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,07%, didorong oleh investasi, industri manufaktur, sektor konstruksi, dan jasa yang berkembang pesat. Permintaan global juga mulai membaik, sehingga ekspor mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Ekonomi tumbuh lebih kuat pada 5,17%, ditopang oleh konsumsi domestik, pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, serta kenaikan beberapa harga komoditas ekspor penting Indonesia. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi stabil di 5,02% meskipun terdapat ketidakpastian global seperti perang dagang Amerika Serikat–Tiongkok. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhan, sementara investasi mulai melambat akibat tekanan eksternal. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07%, menjadi salah satu capaian terendah sejak krisis keuangan Asia tahun 1998. Penurunan tajam ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menghentikan banyak aktivitas ekonomi, menurunkan konsumsi rumah tangga, dan melemahkan ekspor-impor akibat pembatasan mobilitas global. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia mulai berangsur pulih dengan pertumbuhan sebesar 3,69%. Pemulihan ini dipicu oleh pelonggaran kebijakan pembatasan sosial, percepatan vaksinasi, serta kebijakan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan menjadi 5,31%, menandakan bahwa Indonesia telah berhasil keluar dari fase pemulihan menuju pertumbuhan positif yang stabil. Kinerja ekspor melonjak tajam berkat harga komoditas dunia yang tinggi, terutama batu bara, minyak kelapa sawit, dan nikel. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil di kisaran 5,05%,

menunjukkan kemampuan ekonomi nasional untuk bertahan di tengah ketidakpastian global, seperti perlambatan ekonomi Tiongkok, konflik geopolitik, dan inflasi dunia. Kinerja ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, investasi yang meningkat, serta ekspor yang masih positif meski mulai melandai. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui digitalisasi, hilirisasi industri, dan pembangunan infrastruktur.

Tingginya tingkat laju pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi dalam penurunan tingkat pengangguran. Apabila laju pertumbuhan ekonomi meningkat, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran. Sedangkan ketika pengangguran yang meningkat dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, yang merupakan salah satu komponen penting dalam pengukuran Upah Minimum. Upah Minimum juga sebagai sarana untuk memberikan kesejahteraan para pekerja. Berikut ini grafik upah minimum di Indonesia.



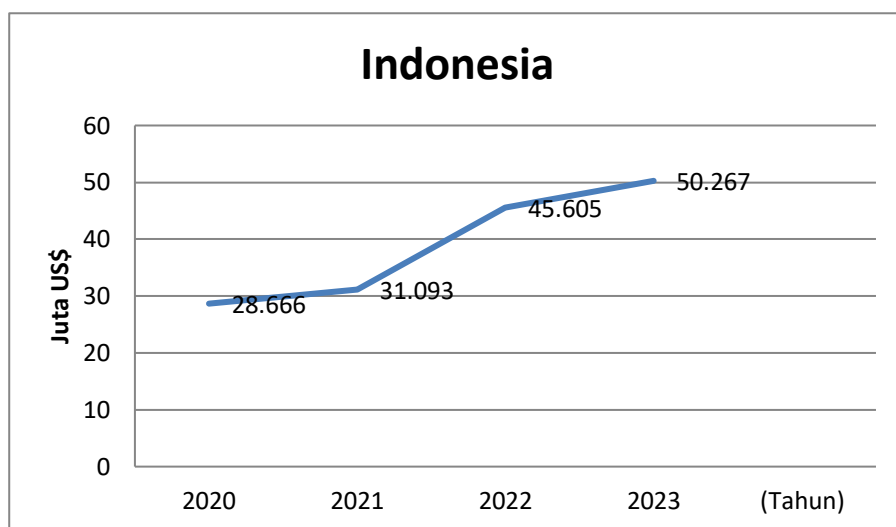
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Gambar 1.3
Upah Minimum Provinsi Indonesia Tahun 2020-2023

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Gambar 1.3 menjelaskan bahwa Upah Minimum Provinsi Indonesia pada periode 2020–2023 mengalami fluktuasi akibat dinamika ekonomi nasional. Pada tahun 2020, upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia mengalami peningkatan rata-rata sekitar 8,5% dibanding tahun sebelumnya sesuai PP No.78/2015. Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan tidak mampu menyesuaikan biaya tenaga kerja sehingga terjadi PHK besar-besaran, terutama di sektor industri dan jasa. Memasuki tahun 2021, pemerintah memutuskan untuk menahan kenaikan UMP di sebagian besar provinsi, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kompromi antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha di tengah dampak pandemi. Akibatnya, hanya beberapa provinsi yang menaikkan UMP, sementara sebagian besar tetap sama dengan tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah pada tahun tersebut masih pada pemulihan dunia usaha agar tidak terjadi lonjakan pengangguran. Dari sisi pekerja, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, karena sebagian merasa daya beli mereka menurun akibat inflasi dan stagnasi pendapatan. Pada tahun 2022, UMP kembali mengalami kenaikan rata-rata sekitar 1,09% secara nasional. Pemerintah menahan kenaikan UMP di banyak provinsi melalui SE Menaker No. M/11/HK.04/X/2020 untuk menjaga kelangsungan usaha. Akibatnya, daya beli pekerja menurun sementara perusahaan mencoba bertahan. Kondisi ini menjaga agar pengangguran tidak bertambah signifikan. Pada tahun 2023, upah minimum provinsi kembali meningkat rata-rata sebesar 7,2% secara nasional. Kenaikan moderat ini

membantu menyeimbangkan kesejahteraan pekerja tanpa menekan perusahaan secara berlebihan, sehingga pengangguran mulai menurun.

Dalam mengurangi tingkat pengangguran, dibutuhkan penanaman modal asing di Indonesia. Kebijakan Penanaman Modal Asing bertujuan untuk meningkatkan investasi sehingga perusahaan banyak membutuhkan para pekerja. Berikut ini grafik penanaman modal asing di Indonesia selama 4 tahun terakhir.



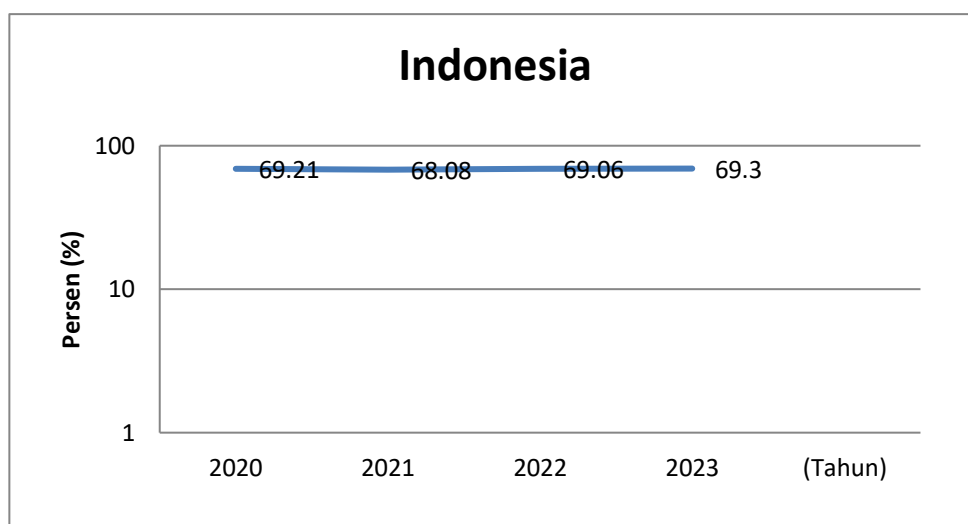
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Gambar 1.4
Penanaman Modal Asing Indonesia Tahun 2020-2023

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada gambar 1.4, Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia selama 2020–2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia menurun akibat dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai realisasi PMA pada tahun 2020 mencapai sekitar USD 28,7 miliar, turun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena ketidakpastian ekonomi global, pembatasan perjalanan internasional, serta gangguan rantai pasok

global yang menghambat masuknya investor asing. Banyak proyek investasi tertunda atau dibatalkan, terutama di sektor manufaktur, transportasi, dan pariwisata. Kondisi ini menggambarkan bahwa pandemi memberikan tekanan besar terhadap arus modal asing dan memperlambat penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor produktif. Pada tahun 2021, PMA mulai mengalami pemulihan dengan realisasi mencapai sekitar USD 31,1 miliar atau tumbuh sekitar 8% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan mulai pulihnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia setelah pemerintah melakukan berbagai reformasi kebijakan investasi, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Tahun 2022 menjadi momentum penting bagi peningkatan investasi asing di Indonesia. Realisasi PMA melonjak signifikan menjadi sekitar USD 45,6 miliar, naik lebih dari 45% dibanding tahun 2021. Lonjakan ini didorong oleh stabilitas politik dan ekonomi nasional, perbaikan iklim investasi, serta kenaikan harga komoditas global. Pada tahun 2023, PMA kembali menunjukkan peningkatan stabil, dengan realisasi mencapai sekitar USD 47,9 miliar. Peningkatan ini menandakan bahwa Indonesia berhasil mempertahankan daya tariknya sebagai salah satu destinasi investasi utama di kawasan Asia Tenggara. Faktor pendukungnya antara lain adalah komitmen pemerintah terhadap hilirisasi industri sumber daya alam, pengembangan ekonomi hijau (green economy), serta transformasi digital di berbagai sektor.

Tingkat pengangguran di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh penanaman modal asing, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, salah satunya adalah partisipasi angkatan kerja. Partisipasi angkatan kerja merupakan penduduk yang bersedia dan mampu mencari pekerjaan. Ketika tingkat partisipasi angkatan kerja naik, maka akan mendorong dalam menurunkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, analisis terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja sangat penting dalam memahami dinamika sosial dan ekonomi di Indonesia. Berikut ini adalah grafik tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia dalam 4 tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

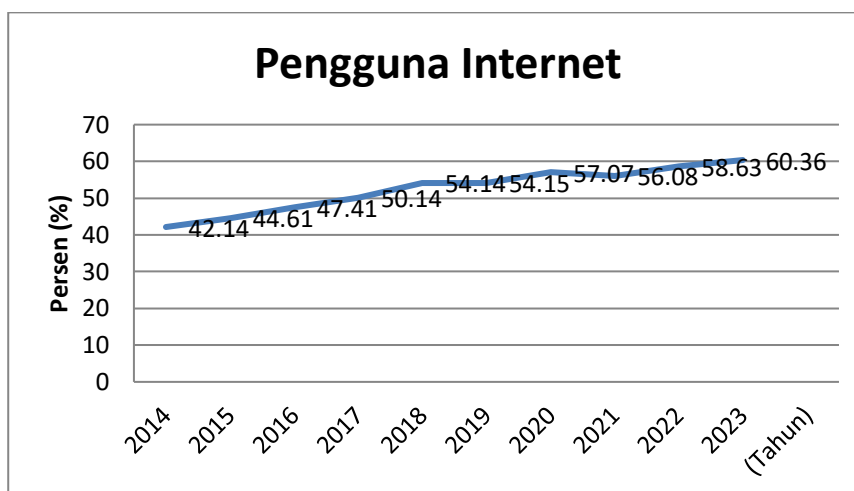
Gambar 1.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia
Tahun 2020-2023

Berdasarkan pada Gambar 1.5 dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia pada periode 2020–2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Indonesia tercatat sebesar 69,21%. Angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat dampak pandemi Covid-19 yang

membatasi aktivitas ekonomi dan menyebabkan banyak tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Banyak penduduk usia kerja, terutama perempuan dan pekerja sektor informal, sementara waktu tidak aktif dalam pasar tenaga kerja karena pembatasan sosial dan penurunan permintaan tenaga kerja. Pada tahun 2021, TPAK menurun menjadi 68,08%, menunjukkan bahwa pemulihan partisipasi tenaga kerja belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Meskipun aktivitas ekonomi mulai meningkat seiring pelonggaran kebijakan pembatasan sosial dan program vaksinasi nasional, banyak pekerja belum kembali ke pasar kerja formal. Pada tahun 2022, TPAK meningkat menjadi 69,63%, menandakan pemulihan yang cukup kuat dalam partisipasi tenaga kerja. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya situasi ekonomi nasional, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar tenaga kerja, serta mulai terbukanya kembali berbagai sektor usaha. Pada tahun 2023, TPAK kembali meningkat menjadi 70,09%, yang merupakan salah satu capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir. Hal ini mencerminkan stabilitas dan optimisme pasar tenaga kerja nasional di tengah pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5%. Kenaikan ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terdorong untuk masuk ke pasar tenaga kerja karena membaiknya kesempatan kerja dan meningkatnya investasi.

Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penyerapan tenaga kerja memberikan dampak dalam penurunan tingkat pengangguran. Namun di satu sisi, penurunan tingkat pengangguran juga dipengaruhi oleh teknologi salah satunya yaitu adanya internet. Internet merupakan akses teknologi dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Ketika pengguna internet meningkat, maka akan mengurangi tingkat pengangguran. Berikut ini adalah grafik penggunaan internet di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Gambar 1.6
Pengguna Internet Berusia 25 Tahun Keatas Indonesia
Tahun 2020-2023

Pada gambar 1.6 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada data penggunaan internet di Indonesia tahun 2014–2023, terlihat terjadi peningkatan tajam dan konsisten selama satu dekade terakhir. Pada tahun 2014, jumlah pengguna internet masih relatif rendah sekitar 17,1%, mencerminkan keterbatasan akses infrastruktur dan perangkat digital. Tahun 2015–2016 menunjukkan peningkatan signifikan menjadi sekitar 22%–25%, seiring meluasnya jaringan 3G dan 4G di berbagai wilayah. Memasuki tahun 2017, penetrasi internet melonjak ke 32,3%, didorong oleh pertumbuhan pengguna smartphone dan media sosial. Tren ini terus berlanjut pada 2018 dengan 39,9%, kemudian mencapai 47,7% di 2019, menandai semakin kuatnya digitalisasi ekonomi. Tahun 2020 menjadi titik lonjakan tajam mencapai 57,07%, karena pandemi Covid-19 memaksa aktivitas

masyarakat beralih ke platform digital untuk bekerja, belajar, dan bertransaksi daring. Meskipun 2021 sedikit menurun menjadi 56,08% akibat adaptasi pascapandemi, pada 2022 kembali meningkat menjadi 58,63%, dan mencapai 60,36% pada 2023 berkat pemulihan ekonomi serta ekspansi ekosistem digital nasional. Peningkatan tajam selama periode ini menunjukkan bahwa internet telah menjadi faktor transformasi struktural dalam perekonomian Indonesia, memperkuat konektivitas, efisiensi kerja, serta membuka peluang lapangan kerja baru di sektor digital (BPS, 2023).

Dari latar belakang di atas, menurut Sugianto (2020) dalam (Tito Pernandhy, n.d) tingginya tingkat pengangguran maka akan menjadi penghambat dalam proses pembangunan, sebab berkurangnya jumlah penerimaan dan rendahnya produktifitas sumber daya manusia, maka berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengangguran. Adapun alasan peneliti memilih fenomena pengangguran di Indonesia yakni untuk diteliti lebih lanjut, karena pengangguran merupakan masalah sosial yang banyak terjadi pada negara berkembang terutama di Indonesia. Jika tidak diatasi dengan cara yang bijak maka dapat memperburuk keadaan perekonomian yang ada pada suatu negara.

Kebaruan dari penelitian ini yakni adanya Penggunaan Internet sebagai variabel *moderating* dan Penanaman Modal Asing sebagai variabel *intervening*. Karena untuk Penggunaan Internet belum banyak yang meneliti sebagai variabel *moderating* selama periode kurun waktu 23 tahun yakni tahun 2000-2023. Dari hal tersebut peneliti mengangkat tema skripsi fenomena tingkat pengangguran

terbuka di Indonesia, dengan judul **“Peran Internet dan Penanaman Modal Asing dalam Memoderasi dan Mengintervensi Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2000-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2000-2023?
- b. Bagaimana peran Internet dalam memoderasi pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2000-2023?
- c. Bagaimana peran Penanaman Modal Asing dalam mengintervensi pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2000-2023?
- d. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2000-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2000-2023?
- b. Untuk mengetahui peran Internet dalam Memoderasi pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2000-2023?
- c. Untuk mengetahui peran Penanaman Modal Asing dalam Mengintervensi pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2000-2023?
- d. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2000-2023?

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi acuan pendukung bagi peneliti yang tertarik dalam bidang penelitian yang khususnya mengenai pengangguran.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan dijadikan bahan, sekaligus rekomendasi mengenai pengaruh variabel diatas khususnya kebijakan dalam mengurangi Tingkat Pengangguran di Indonesia.

- b. Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu teknologi Pendidikan khususnya dalam pengembangan ilmu terutama dalam bidang Ekonomi Pembangunan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Indonesia. Lebih tepatnya mengenai wilayah negara Indonesia. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu publikasi laporan LPE, Upah Minimum, Penanaman Modal Asing, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pengguna Internet melalui sumber terpercaya yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dalam angka dan sumber lain yang relevan dengan kajian peneliti.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat diselesaikan sesuai dengan matriks yang direncanakan.

